

## PERAN SEKTOR UNGGULAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

<sup>1</sup>Frederic Winston Nalle

<sup>1</sup>Ekonomi Pembangunan, Universitas Timor, Alamat Jl. Km. 09 Kelurahan Sasi  
Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara - Propinsi Nusa Tenggara  
Timur

E-Mail: fredericnalle@gmail.com

Submit: 9-2-2022

Revisi: 9-4-2022

Diterima: 12-5-2022

### Abstrak

**Peran Sektor Unggulan Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Kabupaten Timor Tengah Utara.** Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang mengutamakan aspek pemerataan guna mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan sektor unggulan sehingga dapat berperan sebagai lokomotif perekonomian daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perubahan dan pergeseran sektor ekonomi, mengklasifikasikan dan memetakan sektor unggulan serta merumuskan strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif. Alat analisis yang digunakan adalah analisis Shift Share, Tipologi Klassen dan analisis SWOT. Jenis data yang digunakan adalah data primer untuk kebutuhan analisis SWOT dan data sekunder untuk kebutuhan analisis *Shift share* dan Tipologi Klasen, dimana data yang digunakan adalah data PDRB dan Ketenagakerjaan per sektor tahun 2015-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui analisis *Shift Share*, secara umum sektor dengan nilai *National Share* (Ns), *Proportional Shift* (Ps) dan *Differential Shift* (D) terbesar adalah sektor pertanian. Melalui analisis Tipologi Klassen, sektor-sektor yang berkembang dan tumbuh pesat adalah sektor pertanian dan industri manufaktur. Oleh karena itu, strategi yang dianggap tepat dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif melalui konsep pengembangan sektor unggulan adalah dengan menerapkan Strategi *Strength-Opportunity* (SO), dimana pemerintah diharapkan mampu memanfaatkan segala bentuk kekuatan yang ada dengan tetap memperhatikan berbagai peluang yang dimiliki.

Kata kunci: Pembangunan ekonomi inklusif, Sektor unggulan, Shift-share, Tipologi Klasen,

### ABSTRACT

**Leading Sector Analysis and Development Strategy In Realizing Inclusive Economic Development In North Central Timor District.** Inclusive economic development is development that prioritizes the aspect of equity in order to realize economic justice for all levels of society. Therefore, each local government is expected to be able to optimize the leading sector so that it can act as the locomotive of the regional economy. This study aims to identify and analyze changes and shifts in economic sectors, classify and map leading sectors and formulate appropriate strategies in order to realize inclusive economic development. The analytical tools used are Shift Share analysis, Klassen typology and SWOT analysis. The type of data used is primary data for the needs of SWOT analysis and secondary data for the needs of Shift share analysis and class typology, where the data used are GRDP and Employment data per sector in 2015-2020. The results show that through Shift Share analysis, in general the sector with the largest National Share (Ns), Proportional Shift (Ps) value and Differential Shift (D) value is the agricultural sector. Through Klassen's Typology analysis, the sectors that are developing and growing rapidly are the agricultural sector and the manufacturing industry. Therefore, the strategy that is considered appropriate in order to realize inclusive economic development through the concept of developing a leading sector is to apply the Strength-

*Opportunity (SO) Strategy, where the government is expected to be able to take advantage of all forms of existing strengths while taking into account the various opportunities they have.*

**Keywords:** *Inclusive economic development, Leading sector, Shift-share, Tipologi of class.*

## 1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi inklusif dalam satu dekade belakangan ini mulai mendapat perhatian serius dari badan ekonomi dunia. Melalui sekjen PBB tepatnya pada saat kegiatan Konfrensi Umum ke 15 *United Nation Industrial Development Organization* pada tanggal 2-6 Desember di Kota Lima-Peru, menekankan agar setiap negara perlu menerapkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Gupta & Vegelin, 2016). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan upaya penciptaan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses kesempatan kerja yang luas secara berkeadilan, peningkatan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah (Hartati, 2021).

Salah satu faktor penting penentu dalam mewujudkan keadilan ekonomi adalah kesempatan kerja (*employment*). Ada hubungan linearitas negatif antara kesempatan kerja dan pengangguran. Jika semakin tinggi kesempatan kerja yang didapatkan seseorang maka jumlah angka pengangguran semakin berkurang sehingga tercipta kondisi ekonomi yang kondusif (Gupta dan Vegelin, 2016). Dalam keadaan *full employment* akan menciptakan *sustanaibel development* dan secara serentak terjadi perbaikan keinklufian (Suryanto, 2014).

Provinsi Nusa Tenggara Timur yang letak wilayahnya berbatasan langsung dengan Negara Democratic Timor Leste memiliki permasalahan kemiskinan cukup krusial. Badan Pusat Statistik Nasional (2021), mencatat bahwa secara nasional Provinsi NTT

menduduki posisi ke 32 dari total 34 Provinsi yang ada di Indonesia sebagai provinsi termiskin. Hanya berada dua tingkat di atas Provinsi Papua dan Papua Barat. Salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan disebabkan oleh karena masih terdapat adanya gejala eksklusifitas pembangunan wilayah. Eksklusifitas pembangunan wilayah yang terjadi bukan hanya ada di antara kabupaten atau kota saja akan tetapi juga antar kota dan wilayah pedesaan. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari karakteristik wilayah di Provinsi NTT yang secara geografis terdiri dari banyak kepulauan menyebabkan konektifitas pembangunan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain dalam pembangunan infrastruktur seperti akses transportasi, energi dan telekomunikasi menelan anggaran yang sangat besar sehingga sulit untuk direalisasi. Adanya indikasi ketimpangan wilayah ini dapat terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga kualitas pembangunan ekonomi wilayah yang berbeda (Alfiansyah dan Budyana, 2020).

Salah satu daerah yang berada dalam wilayah Provinsi NTT dan memiliki kontribusi cukup besar dalam menyumbang angka kemiskinan adalah Kabupaten Timor Tengah Utara. Badan Pusat Statistik Provinsi NTT (2021) mencatat bahwa Kabupaten TTU berada di posisi ke delapan dari total 22 Kabupaten/Kota Provinsi NTT sebagai wilayah dengan prosentase angka kemiskinan yang cukup tinggi. Tingginya angka kemiskinan ini juga lebih disebabkan oleh masih rendahnya kinerja ekonomi daerah yang terkonfirmasi lewat ukuran nilai sembilan sektor ekonomi pembentuk Produk Domestik Regional

Bruto. Dari sembilan sektor tersebut sektor pertanian memiliki peran kontribusi terbesar terhadap total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten TTU karena sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

Sejak tahun 2015-2020 berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2021) jumlah persentase sektor ekonomi yang paling dominan adalah sektor pertanian sebesar 45,07 persen. Akan tetapi dari tahun ke tahun nilai kontribusi sektor pertanian semakin menurun dan kondisi ini memicu makin tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Pada tahun 2015 persentase tingkat kemiskinan sebesar 21,33 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 24,07 persen. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut mempertegas bahwa besarnya kontribusi sektor pertanian belum mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat pelaku usaha tani.

Menyadari akan kompleksitas masalah kemiskinan dan bagaimana cara penanggulangannya maka sudah selayaknya perlu mendapat perhatian serius dari seluruh *stakeholders* karena diyakini bahwa harkat dan martabat seseorang dapat terangkat jika memperoleh penghidupan yang layak. Penanggulangan kemiskinan dalam konteks kedaerahan, diperlukan harmonisasi keterpaduan program pada setiap institusi terkait baik itu lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan dan sektor perbankan hingga partisipasi masyarakat luas (Prawoto, 2010). Masalah utama yang dihadapi pembangunan pertanian sehingga menyebabkan tingginya angka kemiskinan di sektor ini lebih disebabkan oleh karena masih terdapatnya gejala disparitas dalam akses faktor produksi baik *input* maupun *output*, ketimpangan

kepemilikan lahan dan juga aksesibilitas teknologi (Nalle, 2018).

Menyikapi akan kondisi ini maka salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam upaya menekan ketimpangan pembangunan wilayah adalah dengan cara menggali dan memanfaatkan potensi sektor unggulan sehingga dapat dijadikan sebagai lokomotif utama penggerak sektor dan sub sektor ekonomi lainnya. Pada prinsipnya pembangunan wilayah harus berorientasi pada pemecahan masalah penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan antar wilayah (Kamaruddin dan Alam, 2019).

Selama ini telah banyak yang melakukan penelitian sejenis dalam mengungkapkan sektor unggulan di setiap daerah, akan tetapi masih sangat jarang yang melakukan penelitian lanjutan bagaimana mengaitkan keberadaan sektor unggulan dengan penentuan strategi yang tepat sasaran dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan wilayah yang sesuai dan akomodatif dengan potensi wilayah, akan turut berpengaruh pada rangkaian aktifitas ekonomi yang saling terintegrasi dalam ragam sektor dan sub sektor ekonomi sehingga sasaran utama dari tujuan pembangunan seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, menghidupkan gairah investasi dan diversifikasi kegiatan ekonomi dapat tercapai.

Dengan adanya pemetaan potensi ekonomi berdasarkan sektor unggulan maka ada beberapa hal penting yang dapat diperoleh pemerintah daerah dalam pengembangan minat investasi antara lain; **Pertama**, pemerintah memiliki basis data yang valid sehingga dapat dijadikan sebagai materi promosi untuk menarik

investor dan juga program-program pembangunan yang masuk dalam skala prioritas mampu dinegosiasikan dengan pemerintah pusat. **Kedua**; pemerintah dapat menyusun berbagai kerangka kebijakan yang lebih tepat sasaran dan secara sistematis mampu mengeliminir tantangan dan kendala baik yang bersifat struktural, institusional maupun legalitas dalam pengembangan bisnis dan investasi daerah (Prawoto, 2010).

Menyadari akan pentingnya peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan inklusif berdasarkan pemetaan sektor unggulan maka yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui pola perubahan dan pergeseran sektor perekonomian daerah; 2) mengetahui klasifikasi pertumbuhan sektor ekonomi dan; 3) untuk mengetahui strategi yang tepat dalam pengembangan sektor unggulan sehingga mampu mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif di Kabupaten TTU.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi NTT terhitung dari tahun 2015-2020. Ada beberapa tahapan analisis untuk dapat mengetahui pergeseran dan pemetaan sektor unggulan hingga dapat menentukan pengambilan strategi yang tepat dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara (i) observasi; hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian seperti berbagai aktifitas para petani mulai dari pra produksi hingga pada pemasaran hasil pertanian. (ii) wawancara; dimaksudkan agar peneliti mendapatkan informasi yang utuh akan berbagai rangkaian kegiatan produksi pertanian dan juga kendala-kendala yang dihadapi, (iii) dokumentasi;

menghimpun data-data publikasi yang berhubungan langsung dengan kebutuhan analisis data seperti data pertumbuhan ekonomi Kabupaten TTU dan Provinsi NTT, data laju pertumbuhan sektoral Kabupaten TTU dan Provinsi NTT, data tenaga kerja per sektor yang ada baik di Kabupaten TTU dan juga Provinsi NTT. Kemudian teknik pengumpulan data yang terakhir adalah (iv) dengan cara penyusunan dan penyebaran kusioner; hal ini dimaksudkan agar peneliti mendapatkan informasi yang berhubungan dengan indikator kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam kaitannya dengan pengembangan sektor unggulan.

Selain data sekunder berupa publikasi BPS Provinsi NTT dan Kabupaten TTU, adapun jenis data primer yang digunakan untuk kebutuhan SWOT analisis. Oleh karena itu yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten TTU selaku pemilik program pembangunan wilayah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten TTU, Beberapa Akademisi yang kompeten di bidang pengembangan sektor pertanian, pelaku usaha tani dan juga beberapa orang petani aktif yang berdomisili di Kelurahan Sasi Kabupaten TTU sehingga total sampel yang digunakan berjumlah 60 orang responden.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan penelitian maka ada beberapa tahapan dan alat analisis yang digunakan antara lain adalah: **Pertama**; Analisis *Shift Share*. Analisis ini dilakukan guna mengetahui kinerja perekonomian wilayah analisis, dibandingkan dengan wilayah referensi yang lebih tinggi. Di dalam Analisis Shift share tujuan yang ingin didapatkan adalah untuk melihat pola perubahan dan pergeseran struktur ekonomi wilayah dengan membandingkan nilai Pertumbuhan

PDRB pada wialyah analisis dengan nilai yang sama pada wilayah referensi atau wialyah acuan. Analisis *shift share* sendiri terdiri dari tiga komponen utama yang antara lain adalah nilai *national share*, *diferential shift* dan *propotional shift*. Tarigan dalam (De FRETES, 2017).

**Kedua;** Analisis Tipologi Klasen. Menurut Mahmudi dalam (Wahyuningsih, 2021), Typologi klasen merupakan pemetaan atau klasifikasi suatu sektor ekonomi ke dalam empat kuadran utama berdasarkan nilai pertumbuhan ekonomi dan kontribusi setiap sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB wilayah tertentu. Klasifikasi sektoral ini terbagi ke dalam 4 kuadran yang terdiri dari sektor unggulan, sektor potensial, sektor berkembang dan sektor terbelakang.

**Ketiga;** Analisis SWOT. Freddy Rangkuti dalam (Nisak, 2013), menjelaskan Analisis SWOT merupakan suatu kajian berdasarkan identifikasi secara sistematis dan terukur akan berabagai faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal guna menentukan strategi yang tepat bagi perusahaan/institusi ataupun lembaga pemerintah. Hasil identifikasi faktor internal ini tergolong dari kekuatan dan kelemahan yang dikenal sebagai *Internal Factor Analysis Summery* (IFAS) dimana

terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Sedangkan untuk faktor eksternal dikenal dengan istilah *Ekternal Factor Analysis Summery* (EFAS) yang terdiri dari peluang dan ancaman. Hasil perbandingan Analisis IFAS dan EFAS menghasilkan matrix SWOT guna menentukan strategi yang tepat dalam pengembangan sektor unggulan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif di Kabupaten TTU.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### Analisis *Shift Share*

Pada prinsipnya analisis *shift share* digunakan untuk melihat pola perubahan pergeseran struktur ekonomi dengan cara membandingkan nilai Pertumbuhan PDRB tiap sektor di wilyah analisis dengan nilai PDRB yang ada di wilayah yang lebih tinggi statusnya (wilayah referensi/wilayah nasional). Komponen analisis *Shift Share* akan terbagi ke dalam tiga komponen yaitu *National Share*, *Proportional shift* dan *Deferenstial Shift* dengan bentuk formulasi yang digunakan adalah  $\Delta E_{r,i,t} = (Ns_{,i} + Pr_{,i} + Dr_{,i})$ . Untuk dapat mengetahui bagaimana perubahan struktur ekonomi di Kabupaten TTU selama periode pengamatan tahun 2015-2020 maka dapat dilihat dari hasil perhitungan di bawah ini.

**Tabel 1.** Analisis *Shift Share* Kabupaten Timor Tengah Utara atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha (juta rupiah), 2015-2020.

Lapangan Usaha	PDRB Provinsi NTT (Juta Rupiah)			PDRB Kabupaten TTU (Juta Rupiah)		
	2015	2020	EN,i,t	2015	2020	$\Delta E_{r,i,t}$
	EN,i, tn	EN, i, t		E r,i,tn	E r,i,t	
Pertanian	14.244.98	16.504.10	2.259.12	278.987.59	1.384.444.70	1.105.457.11
Penambangan dan penggalian	664.14	880.1	215,96	6.534.32	65.799.80	59.265.48
Industri pengolahan	587.1	745.2	158,05	8.247.86	36.119.10	27.871.24
Listrik, Gas. Dan Air Bersih	58.77	87	28.23	1.742.36	2.286.20	543,84
Konstruksi	4.834.57	6.543.00	1.708.43	32.101.50	334.370.30	302.268.80
Perdagangan, Hotel dan Restoran	5.354.16	7.320.00	1.965.84	37.705.97	187.739.60	150.033.63
Transportasi dan Komunikasi	6.053.12	8.292.70	2.239.58	33.226.22	351.869.80	318.643.58

Keuangan, Leasing, dan Layanan Korporat	2.932.22	4.037.30	1.105.08	13.969.54	155.203.00	141.233.46
Layanan Lainnya	11.605.01	15.366.30	3.761.29	99.200.47	790.110.70	690.910.23
<b>Jumlah</b>	<b>46.334.12</b>	<b>59.775.70</b>	<b>13.441.58</b>	<b>511.715.83</b>	<b>3.307.943.20</b>	<b>2.796.227.37</b>

Sumber: Olahan Data Sekunder Tahun 2021.

### Perhitungan *National Share* (Ns)

Dalam analisis ini tujuan yang ingin didapatkan adalah agar diperoleh informasi bagaimana pengaruh dari pertumbuhan ekonomi secara nasional dapat memberikan dampak bagi nilai sektor ekonomi pembentuk PDRB di wilayah analisis. Dimana dalam

penelitian ini yang menjadi wilayah acuan atau wilayah referensi adalah Provinsi NTT sedangkan yang menjadi wilayah analisis adalah Kabupaten TTU. Untuk dapat mengetahui hasil perhitungan *National Share* maka dapat dilihat dalam table berikut ini.

**Tabel 2.** Nilai *National Share* (NS) Kabupaten TTU Tahun 2015-2020.

Lapangan Usaha	E r, I, tn (A)	EN, t/EN, tn (B)	C (a)x (b)	Nasional Share (c) - (a)
Pertanian	278.987.59	1.29	3589893.991	80.906.40
Penambangan dan penggalian	6.534.32	1.29	8429.2728	1.894.95
Industri pengolahan	8.247,86	1.29	10639.7394	2.391.88
Listrik, Gas. Dan Air Bersih	1.742,36	1.29	2247.6444	505.28
Konstruksi	32.101,50	1.29	41410.935	9.309.44
Perdagangan, Hotel dan Restoran	37.705.97	1.29	48640.7013	10.934.73
Transportasi dan Komunikasi	33.226,22	1.29	42861.8238	9.635.60
Keuangan, Leasing, dan Layanan Korporat	13.699.54	1.29	18020.7066	4.051.17
Layanan Lainnya	99.200,47	1.29	127968.606	28.768.14
<b>Jumlah</b>	<b>511.715.83</b>	<b>11.61</b>	<b>660113.421</b>	<b>148.397.59</b>

Sumber: Olahan Data Sekunder Tahun 2021

Nilai *National Share* menjelaskan tentang penambahan sektor ekonomi dalam pembentukan nilai total PDRB di wilayah analisis dan kontribusinya terhadap wilayah referensi. Berdasarkan hasil analisis data dalam table 2 di atas maka dapat diketahui bahwa selama periode pengamatan terhitung dari tahun 2015-2020 kinerja perekonomian wilayah di Kabupaten TTU mengalami peningkatan *absolute* sebesar Rp. 148,397,590,000. Kontribusi terbesar dalam menyumbang pendapatan daerah Kabupaten TTU datang dari sektor pertanian dengan nilai sebesar Rp. 80,906,400,000 kemudian diikuti sektor jasa sebesar Rp. 28.768.590.000 dan juga sektor Perdagangan Hotel dan Restoran

sebesar Rp.10.934.730.000 dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp. 9.635.600.000. Hasil ini juga turut menjelaskan bahwa kinerja perekonomian wilayah Kabupaten TTU masih sangat didominasi oleh sektor pertanian bahkan terdapat disparitas kontribusi sektoral yang sangat timpang antara sektor pertanian dengan sektor ekonomi lainnya. Peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB daerah diyakini dapat mengurangi disparitas pendapatan (Hamdika et al., 2019).

### Perhitungan *Proportional Shift*

Komponen analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proporsi

pertumbuhan sektoral pembentuk PDRB di wilayah analisis (Kabupaten TTU) dan di wilayah referensi (Provinsi NTT).

Hasil perhitungan komponen proportional shift dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.** Perhitungan Proporsional Shift di Kabupaten TTU Tahun 2015-2020

Lapangan Usaha	$E_{r,i,t_n}$ (A)	$EN_{i,t_n} / EN_{i,t_n}$ (B)	$EN_{t/E,N,t_n}$ (C)	(D) (b)-(c)	Proporsional Share (a) x (d)
Pertanian	278.987.59	1.16	1.29	-0,13	-36268.3867
Penambangan dan penggalian	6.534.32	1.32	1.29	0,03	196.0296
Industri pengolahan	8.247.86	1.27	1.29	-0.02	-164.9572
Listrik, Gas, Dan Air Bersih	1.742.36	1.48	1.29	0.19	331.0484
Konstruksi	32.101.50	1.35	1.29	0,06	1926.09
Perdagangan, Hotel dan Restoran	37.705.97	1.37	1.29	0,08	3016.4776
Transportasi dan Komunikasi	33.226.22	1.37	1.29	0,08	2658.0976
Keuangan, Leasing, dan Layanan Korporat	13.969.54	1.38	1.29	0,09	1257.2586
Layanan Lainnya	99.200.47	1.32	1.29	0,03	2976.0141
<b>Jumlah</b>	<b>511.715.83</b>	<b>12.02</b>	<b>11.61</b>	<b>0,41</b>	<b>-24072.328</b>

Sumber: Olahan Data Sekunder Tahun 2021

Hasil perhitungan nilai *Proportional Shift* sebagaimana yang tertera dalam table 3 menjelaskan bahwa di Kabupaten TTU saat ini terdapat dua sektor ekonomi yang laju pertumbuhan sektoralnya tumbuh lebih lambat dari wilayah referensi. Kedua sektor tersebut adalah sektor pertanian dan sektor industry pengolahan. Ada hal menarik yang perlu dicermati disini bahwa pada hasil analisis *National Share* diperoleh informasi bahwa begitu dominannya sektor pertanian dalam menyumbang pendapatan absolute Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten TTU dengan nilai kontribusi sebesar 54,52%, akan tetapi berbeda dengan yang didapatkan dari hasil analisis *proportional shift* dimana nilai yang diperoleh justru sektor pertanian mengalami pertumbuhan negative sebesar -362.683.867. Begitu juga dengan sektor industry pengolahan yang mengalami pertumbuhan negative sebesar -164.972,2. Makna dari kontradiksi perhitungan antara nilai *National Share* dan *Proportional Shift* yang diperoleh menggambarkan bahwa meskipun sektor

pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja begitu besar dan dapat diandalkan dalam menyumbang pendapatan daerah dan juga pertumbuhan ekonomi wilayah, akan tetapi sektor pertanian masih menyimpan ragam permasalahan dalam pengembangannya dikarenakan memiliki laju pertumbuhan sektoral yang sangat lambat akibat tidak memiliki keunggulan kompetitif pada setiap jenis tanaman pangan. Rendahnya *value added* sektor pertanian merupakan indikasi kuat lemahnya sektor pertanian mampu bersaing di level nasional. Hal ini diperkuat lagi oleh sektor pendukung industry pengolahan yang juga mengalami pertumbuhan negative.

### Perhitungan *Differential Shift*

Di dalam analisis komponen *Differential Shift* dimaksudkan untuk dapat mengetahui bagaimana peran sektor ekonomi pembentuk PDRB di wilayah analisis memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) atau sektor yang memiliki daya saing dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah acuan. Dalam penelitian ini wilayah

analisis adalah Kabupaten TTU dan wilayah acuan/referensi adalah Provinsi NTT. Untuk mengetahui hasil analisis

data maka dapat dilihat dalam table di bawah ini.

**Tabel 4.** Perhitungan *Diferensial Shift* Kabupaten TTU Tahun 2015-2020

Lapangan Usaha	E r, i, t	EN, i, t / EN,i, tn	E r, I, tn	(D)	Diferensial Shift
	(A)	(B)	(C)	(b) x (c)	(a) - (d)
Pertanian	1.384.444.70	1.16	278.987.59	323625.6044	1.060.819.10
Penambangan dan penggalian	65.799.0	1.32	6.534.32	8625.3024	57.174.50
Industri pengolahan Listrik, Gas. Dan Air Bersih	36.11910	1.27	8.247.86	10474.7822	25.644.32
Konstruksi	2.286.20	1.48	1.742.36	2578.6928	-292.49
Perdagangan, Hotel dan Restoran	334.370.30	1.35	32.101.50	43337.025	291.033.28
Transportasi dan Komunikasi	187.739.60	1.37	37.705.97	51657.1789	136.082.42
Komunikasi	351.869.80	1.37	33.226.22	45519.9214	306.349.88
Keuangan, Leasing, dan Layanan Korporat	155.203.00	1.38	13.969.54	19277.9652	135.925.03
Layanan Lainnya	790.110.70	1.32	99.200.47	130944.6204	659.166.08
<b>Jumlah</b>	<b>3.307.943.20</b>	<b>12.02</b>	<b>511.715.83</b>	<b>636041.0927</b>	<b>2.671.902.11</b>

Sumber: Olahan Data Sekunder Tahun 2021

Hasil analisis pada komponen *Defferential Shift* yang bernilai negative terdapat pada sektor Listrik, Gas dan Air bersih sebesar -292,49. Sedangkan untuk 8 sektor ekonomi lainnya mengalami pertumbuhan yang positif. Nilai negative untuk sektor listrik gas dan air bersih menunjukkan juga bahwa pertumbuhan sektor ini lebih lambat dari pertumbuhan sektor yang sama di wilayah referensi (Provinsi NTT). Hal ini dapat dirasakan bahwa faktanya hidup di era yang semakin modern ini justru masih terdapat banyak masyarakat di pelosok desa Kabupaten TTU yang belum merasakan penerangan lampu akibat minimnya jaringan akses listrik. Keterbatasan kapasitas daya pada mesin pembangkit listrik bertenaga diesel yang difasilitasi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Kefamenanu merupakan salah satu alasan belum meratanya program listrik masuk desa. Ada energi alternatif berupa penggunaan tenaga surya untuk mendukung program listrik masuk desa akan tetapi terasa belum begitu maksimal

akibat minimnya pemahaman dan juga kemampuan yang sangat terbatas dimiliki oleh masyarakat desa. Ketahanan energi yang sangat terbatas di Provinsi NTT pada umumnya sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Posma et al., (2019) yang mengatakan bahwa Kabupaten TTU merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi NTT yang terkategori memiliki ketahanan energi terburuk.

Persoalan lain yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan air bersih yang layak dikonsumsi. Di Kabupaten TTU Lembaga Pemerintah yang memfasilitasi ketersediaan jaringan pipa untuk mendapatkan akses layanan air bersih adalah Perusahaan Daerah "Tirta Cendana" yang mana perusahaan ini merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bergerak pada pemenuhan kebutuhan air bersih bagi setiap rumah tangga dan juga industry berskala kecil. Akan tetapi hadirnya perusahaan air minum milik pemerintah daerah ini terasa belum mampu

menjawab kebutuhan masyarakat umumnya. Jumlah pasokan air kepada setiap rumah tangga memiliki kapasitas yang sangat terbatas. Kondisi alam yang beriklim tropis dengan curah hujan yang rendah ditambah lagi dengan daya dukung lingkungan untuk menjaga sumber-sumber mata air yang semakin terdegradasi merupakan masalah yang semakin kompleks di tengah upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih (Jocom et al., 2016).

### Tipologi Klassen

Analisis tipologi Klassen dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan sektor unggulan di Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan pemetaan potensi sektoral. Nilai yang digunakan untuk menentukan posisi masing-masing sektor, dibagi menjadi 4 kuadran berdasarkan perbandingan tingkat pertumbuhan rata-rata sektor tersebut dan juga nilai kontribusi sektor ekonomi antara wilayah analisis (Kabupaten TTU) dan wilayah referensi yang diwakili oleh Provinsi NTT. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

**Tabel 5.** Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor PDRB Provinsi NTT dan Kabupaten TTU Tahun 2015-2020.

PDRB Bidang Usaha	Provinsi NTT		Kabupaten TTU	
	Pertumbuhan Rata-rata (S)	Rata-rata Kontribusi (Sk)	Pertumbuhan Rata-rata (Si)	Rata-rata Kontribusi (Ski)
Pertanian	2,7	29,15	3,52	48,70
Penambangan dan penggalian	5,58	1,45	4,49	1,58
Industri pengolahan	4,47	1,26	5,49	1,33
Listrik, Gas, Dan Air Bersih	14,56	0,14	10,57	0,2
Konstruksi	6,33	10,63	4,63	8,27
Perdagangan, Hotel dan Restoran	12,55	11,88	11,52	6,32
Transportasi dan Komunikasi	11,94	13,41	8,68	8,95
Keuangan, Leasing, dan Layanan Korporat	24,77	6,62	14,30	3,63
Layanan Lainnya	5,28	25,47	12,84	20,93

Sumber: Olahan Data Sekunder Tahun 2021

**Tabel 6.** Klasifikasi PDRB Sektor Kabupaten TTU Tahun 2015-2020 Berdasarkan Tipologi Klassen.

Kuadran I	Kuadran II
Sektor yang maju dan berkembang pesat (sektor maju) $s_i > s$ dan $s_{ki} > s_k$	Sektor maju tapi tertekan (sektor stagnan) $s_i < s$ dan $s_{ki} > s_k$
a. Pertanian b. Industri pengolahan	a. Penambangan dan penggalian b. Listrik, Gas, Dan Bersih
Kuadran III	Kuadran IV
Sektor potensial atau masih berkembang (sektor berkembang) $s_i > s$ dan $s_{ki} < s_k$	Sektor yang relatif tertinggal $s_i < s$ dan $s_{ki} < s_k$
a. Jasa Lainnya	a. Konstruksi b. Perdagangan, Hotel dan Restoran c. Transportasi dan Komunikasi d. Keuangan, Leasing, dan Layanan Korporat.

Sumber: Olahan Data Sekunder Tahun 2021

Ada hal menarik yang didapatkan dari hasil analisis Tipologi klasen dimana terdapat adanya kontradiksi hasil temuan yang menggambarkan bahwa sektor pertanian dan industri pengolahan termasuk ke dalam sektor maju dan berkembang pesat akan tetapi pada analisis *Shift Share* dalam komponen *Proportional Shift* dimana kedua sektor tersebut terbukti mempunyai pertumbuhan yang lambat terhadap PDRB Provinsi NTT. Hal ini dapat disimpulkan bahwa meskipun sektor pertanian merupakan sektor unggulan dikarenakan kontribusi dan laju pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah referensi dalam hal ini adalah Provinsi NTT, akan tetapi dengan nilai *proporsional shift* yang bernilai negatif menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan sektor lain. Hasil penelitian ini tidak berbeda jauh dengan yang ditemukan oleh Sragen (2012) yang menguraikan bahwa salah satu sektor yang terkategori sebagai sektor unggulan di Kota Sragen adalah sektor pertanian akan tetapi masih terdapat ragam permasalahan dalam pengembangannya. Beberapa persoalan mendasar yang menyebabkan rendahnya kualifikasi sektor pertanian sebagai sektor unggulan dikarenakan oleh beberapa faktor penting antara lain: Pola pertanian yang masih

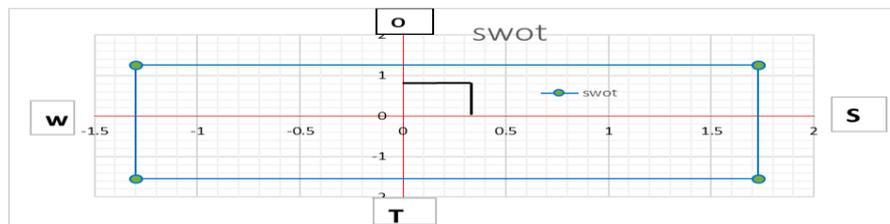
bersifat tradisional (sub system), minimnya akses teknologi dan akses pasar, rendahnya kualitas SDM dan yang tidak kalah penting adalah dikarenakan rendahnya *value added* akibat tidak ada sentuhan agribisnis dan agroindustri pada sektor pertanian (Syahza & Suarman, 2018).

### Analisis SWOT

Setelah diketahui bahwa sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten TTU maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis lanjutan untuk mampu menemukan dan merumuskan alternatif kebijakan yang tepat agar sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan dapat berperan maksimal dalam mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif di Kabupaten TTU. Analisis SWOT ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi *Internal Factor Analysis Strategic* (IFAS) yang terdiri dari Kekuatan dan Kelemahan serta *External Factor Analysis Strategic* (EFAS) yang terdiri dari Peluang dan Ancaman. Setiap indikator yang ada dalam IFAS dan EFAS dilakukan perhitungan bobot nilai dan rating kemudian hasil kuantifikasi tersebut diinterpretasikan ke dalam diagram SWOT dalam rangka penentuan strategi pengembangan dan pembangunan sektor pertanian yang diyakini mampu berperan sebagai lokomotif ekonomi

daerah guna mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif di kabupaten TTU. Hasil perhitungan SWOT Analisis dapat

dilihat dalam Diagram SWOT di bawah ini.



**Gambar 1.** Hasil Analisis SWOT  
 Sumber: Olahan Data Primer Tahun 2021

Dari hasil perhitungan terlihat bahwa di dalam pengembangannya posisi sektor pertanian di Kabupaten TTU berada pada posisi Kuadran II dengan penerapan strategi yang dinilai paling tepat adalah Strategi *Strength-Opportunity* (SO) dikarenakan dinilai sangat berpeluang untuk dikembangkan dengan tetap memperhatikan sejumlah indikator kekuatan yang dimiliki. Kondisi

Kabupaten TTU yang memiliki karakteristik pertanian lahan kering dengan besar prosentase luas lahan sebesar 30,18 persen dari total luas lahan pertanian (Festianto et al., 2019) merupakan salah satu dari sejumlah peluang yang dimiliki untuk dapat ditingkatkan dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

	(4) Kuat	(3) Sedang	(2) Lemah
Tinggi 3	(1) Growth <b>Posisi Sektor Pertanian</b>	(2) Growth	(3) Retrenchment
Sedang 2	(4) Stability	(5) Growth	(6) Retrenchment
Rendah 1	(7) Growth	(8) Growth	(9) Retrenchment

**Gambar 2.** Matriks Analisis SWOT  
 Sumber: Olahan Data Primer Tahun 2021

### Penentuan Strategi

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari analisis *shift share* dan tipologi klasen maka didapatkan informasi bahwa yang merupakan sektor unggulan dan diyakini sebagai sektor yang mampu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sektor pertanian. Hal ini berarti penyerapan tenaga kerja terbesar ada di

sektor pertanian. Akan tetapi yang menjadi persoalan serius disini adalah tingginya kontribusi dan juga laju pertumbuhan sektor pertanian justru berbanding terbalik dengan besarnya angka kemiskinan. Hasil penelitian ini juga searah dengan hasil penelitian Syairozi (2020) yang mengungkapkan bahwa kemiskinan terbesar di Kabupaten Malang ada pada sektor pertanian. Hal senada juga diungkapkan oleh (Ponto et

al., 2015) yang menemukan bahwa ada korelasi yang cukup kuat dan bernilai negative antara variable PDRB Sektor Pertanian dan kemiskinan. Artinya bahwa jika nilai PDRB pada sektor pertanian rendah maka angka kemiskinan makin meningkat di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Menyadari akan pentingnya peranan kontribusi sektor pertanian dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif maka dengan melihat hasil Analisis SWOT, Posisi Kabupaten TTU dalam pengembangan sektor pertanian ada pada penentuan strategi SO. Hal ini diperkuat lagi dengan hasil analisis klasifikasi sektoral dimana posisi sektor pertanian memiliki posisi yang kuat dengan potensi pengembangan yang tinggi. Oleh karena itu adapun langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas pengambil kebijakan antara lain adalah:

**Pertama;** lakukan pendekatan spasial dan perkuat analisis pemetaan potensi komoditi sub sektor pertanian di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten TTU yang berjumlah 24 Kecamatan. Hal ini dilakukan agar para perencana wilayah dapat mengetahui dimana suatu daerah memiliki keunggulan kompetitif dalam kegiatan produksi pertanian (Arifien et al., 2012).

**Kedua,** Pembangunan Infrastruktur pertanian yang massif dengan dukungan anggaran pemerintah yang memadai. Pembangunan sektor pertanian yang saling terintegrasi dengan sektor lainnya dalam rangka untuk menanggulangi angka kemiskinan yang cukup tinggi di Kabupaten TTU sudah seharusnya diarahkan dengan dukungan anggaran yang memadai baik yang bersumber dari dana APBD maupun dana perimbangan yang bersumber dari APBN. Pembangunan infrastruktur pertanian ini berhubungan erat dengan dukungan akses

jaringan listrik dan telekomunikasi, mengingat topografi wilayah Kabupaten TTU yang bergunung gunung dan cukup luas. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku usaha tani memiliki akses komunikasi yang baik dalam mendukung kegiatan produksi dan pemasaran hasil pertanian. Selain jaringan listrik dan telekomunikasi, infrastruktur pendukung lainnya yang dinilai sangat *urgent* adalah sarana transportasi yang memadai berupa akses jalan raya agar memudahkan mobilitas barang dan jasa serta demi peningkatan nilai efisiensi usaha tani (Purwansyah et al., 2013). Prosentase jalan raya yang belum diaspal yang cukup tinggi di Kabupaten TTU menyebabkan sulitnya para petani menjual hasil pertanian mereka di wilayah perkotaan. Akibatnya, sifat hasil pertanian yang tidak bertahan lama dan mudah rusak ini sebagian besar hanya dimanfaatkan petani untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga mereka sendiri. Hal ini diperparah lagi dengan minimnya peran pasar tradisional yang sudah dibangun pemerintah daerah di setiap pusat kecamatan. Buruknya infrasturktur jalan di setiap wilayah pedesaan yang ada di Kabupaten TTU merupakan indikasi kuat akan adanya disparitas pembangunan wilayah. Seperti ditemukan oleh Sutrisno (2012) dalam penelitiannya, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di sektor pertanian juga disebabkan oleh adanya disparitas pembangunan wilayah.

Selanjutnya, infrasturktur pendukung lainnya yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat petani di Kabupaten TTU adalah pembangunan system irigasi baik skala besar berupa bendungan maupun embung di tiap wilayah potensial peghasil komoditi sub sektor pertanian. Minimnya curah hujan akibat musim panas yang panjang, maka karakteristik wilayah pertanian di Kabupaten TTU bercirikan pertanian

lahan kering (Malelak, 2019). Menyadari akan kondisi ini maka sudah seharusnya pemerintah daerah lewat dinas tekhnis terkait memperkuat kegiatan produksi pertanian dengan dukungan system irigasi yang memadai. Pentingnya system irigasi merupakan salah satu faktor penting yang turut berpengaruh terhadap peningkatan produktifitas dan kesejahteraan petani (Triasni, 2019).

**Ketiga,** Perkuat Sumber Daya Manusia/Tenaga Kerja di Sektor Pertanian. Pendidikan merupakan faktor penting dalam kaitannya dengan ketrampilan dan keahlian seseorang. Fakta menunjukkan bahwa rata-rata yang bekerja pada sektor pertanian adalah mereka yang berpendidikan rendah. Usia tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian rata-rata didominasi oleh penduduk usia lanjut bahkan boleh dikatakan sebagai kelompok usia non produktif. Penduduk usia muda produktif hampir tidak ada yang ingin bekerja di sektor pertanian sekalipun memiliki tingkat Pendidikan yang tinggi. Rendahnya minat kelompok muda produktif dan berpendidikan yang ingin bekerja di sektor pertanian lebih diakibatkan oleh *image* atau cara pandang yang mengungkapkan bahwa sektor pertanian identik dengan pekerja kasar dan kotor. Selain itu pula sektor pertanian dipandang sebagai sektor yang kurang menjanjikan sebagai masa depan yang diharapkan akibat rendahnya *value added* di sektor pertanian (Supriyati, 2019). Kondisi ini menuntut agar setiap pemangku kepentingan baik pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pihak Swasta maupun para akademisi agar sesuai dengan perannya masing-masing meningkatkan pemahaman lewat berbagai mimbar akademik dan juga program pelatihan guna meningkatkan minat bekerja di sektor pertanian.

**Keempat;** Bangun konsep Agribisnis dan Perkuat system kelembagaan sektor pertanian guna mendukung seluruh rangkaian kegiatan usaha tani. Seperti yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa rata-rata petani yang ada di Kabupaten TTU bekerja sebagai petani sub sistem. Artinya melakukan usaha tani dengan cara-cara yang tradisional dan konvensional guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kebijakan umum kedepannya yang perlu mendapat prioritas utama seluruh pemangku kepentingan adalah Peningkatan dan pemberdayaan system Agribisnis yang saling terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir (Prawoto, 2010).

Ada empat (4) sub system agribisnis utama yang secara kelembagaan perlu diperhatikan, antara lain adalah: **Pertama;** sub system agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*). Sub system ini menyangkut dukungan ketersediaan segala bentuk input produksi sektor pertanian yang memadai agar setiap pelaku usaha tani di Kabupaten TTU memiliki peluang yang sama untuk mendapatkannya. Tergolong dalam sub sistyem ini antara lain adalah penyediaan bibit unggul, pupuk, pestisida dan juga penyediaan teknologi tepat guna dalam pengolahan lahan pertanian (Khairad, 2020). **Kedua;** sub system usaha tani (*on farm agribusiness*). Dalam sub system ini yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan primer dalam upaya menghasilkan *ouput* pertanian yang berkualitas. Budidaya seluruh komoditi yang ada di sektor pertanian perlu mendapatkan dukungan yang baik dari sub system di tingkat hulu. Penggunaan input produksi yang berkualitas mampu meningkatkan produktifitas sektor pertanian (Mulyono et al., 2017). **Ketiga;** Sub system hilir (*down stream agribusiness*). Pada sub system di tingkat hilir berhubungan

dengan strategi pemasaran dan juga penggunaan teknologi pasca panen agar mampu meningkatkan nilai tambah (*value added*) sektor pertanian. Produk olahan hasil pertanian perlu mendapatkan sentuhan agroindustry. **Keempat**; sub system pendukung agribisnis (*supporting institution*). Dalam sub system ini, pembangunan sektor pertanian perlu mendapatkan dukungan dari berbagai lembaga yang saling memiliki keterkaitan. Antara lain adalah Lembaga keuangan baik formal maupun informal, Lembaga Perguruan Tinggi, Lembaga penelitian, Lembaga penyuluhan Lembaga penyedia informasi, dukungan sarana transportasi serta kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dalam rangka pembangunan sektor pertanian. Adanya sinergitas yang saling terintegrasi antar Lembaga diyakini mampu meningkatkan daya saing komoditi pertanian yang dihasilkan dan pembangunan inklusif di kabupaten TTU dapat diwujudkan (Khairad, 2020).

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan di atas maka beberapa *point* penting yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain: **Pertama**; dari hasil perhitungan *Shift Share* Analisis diketahui bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang sangat dominan kontribusinya dalam menyumbang angka PDRB Kabupaten TTU dengan besar prosentase sebesar 54,52 persen, sedangkan sektor yang memberikan kontribusi paling kecil adalah sektor Listrik, Gas dan Air bersih. Selanjutnya dalam analisis komponen *Proportional Share* diperoleh informasi bahwa tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB justru berbanding terbalik dengan laju pertumbuhannya yang bernilai negative sebesar -362.683.867. Hal yang sama juga terjadi pada sektor Industry

Pengolahan dengan nilai pertumbuhan sebesar -164.972,2. Pada komponen *Differential Shift* didapatkan bahwa sektor yang memiliki pertumbuhan negative adalah sektor Listrik, Gas dan Air bersih dengan besar nilai sebesar -164.972,2. **Kedua**; dari hasil analisis pemetaan potensi sektor ekonomi di dalam Diagram Tipologi Klasen terdapat 2 sektor ekonomi yang terkategori sebagai sektor maju dan tumbuh pesat yaitu sektor pertanian dan industry pengolahan. **Ketiga**; Strategi yang dinilai paling tepat dalam pengembangan sektor unggulan agar mampu mewujudkan pembangunan ekonomi yang Inklusif adalah dengan menerapkan Strategi *Strenght-Opportunity* (SO).

Beberapa hal prinsipil yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten TTU guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif melalui peran sektor pertanian sebagai sektor unggulan antara lain adalah: **Pertama**; lakukan pemetaan spasial potensi komoditi sub sektor pertanian di seluruh wilayah kecamatan yang ada yang berjumlah 24 Kecamatan. **Kedua**; Penyediaan anggaran yang lebih berpihak pada pembangunan infrastruktur daerah hingga ke pelosok desa, terutama pada daerah potensial penghasil komoditi unggul bidang pertanian. **Ketiga**; Perkuat kapasitas Sumber Daya Manusia/Tenaga Kerja di Sektor Pertanian yang handal melalui berbagai pelatihan dan juga Pendidikan formal. **Keempat**; Terapkan konsep Agribisnis dan Perkuat system kelembagaan sektor pertanian mulai dari hulu hingga hilir guna mendukung seluruh rangkaian kegiatan usaha tani.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, H., & Budyanra, B. (2020). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/Kota Di Provinsi

- Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 424–429. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.26>
- Arifien, M., Fafurida, F., & Noekent, V. (2012). Perencanaan Pembangunan Berbasis Pertanian Tanaman Pangan Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 13(2), 288. <https://doi.org/10.23917/jep.v13i2.175>
- De FRETES, P. N. (2017). Analisis Sektor Unggulan (Lq), Struktur Ekonomi (Shift Share), Dan Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua 2018. *Develop*, 1(2). <https://doi.org/10.25139/dev.v1i2.384>
- Festianto, D., Patiung, M., Mael, M. Y., & Tiza, A. L. (2019). Sinergitas dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Pelaksanaan Kebijakan Sektor Pertanian di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Savana Cendana*, 4(02), 31–33. <https://doi.org/10.32938/sc.v4i02.461>
- Gupta, J., & Vegelin, C. (2016). Sustainable development goals and inclusive development. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 16(3), 433–448. <https://doi.org/10.1007/s10784-016-9323-z>
- Hartati, Y. S. R. I. (2021). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura JURNAL EKONOMI & BISNIS Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura*. 12, 79–92.
- Jocom, H., D Kameo, D., Utami, I., & Kristijanto, A. I. (2016). Air dan Konflik: Studi Kasus Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 14(1), 51. <https://doi.org/10.14710/jil.14.1.51-61>
- Kamaruddin, C. A., & Alam, S. (2019). Analisis Potensi Sektor Unggulan dan Pemetaan Kemiskinan Masyarakat di Wilayah Maminasata Sulawesi Selatan. *Jurnal Ad'ministrare*, 5(2), 85. <https://doi.org/10.26858/ja.v5i2.7886>
- Khairad, F. (2020). Sektor Pertanian di Tengah Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Aspek Agribisnis. *Journal Agriuma*, 2(2), 82–89. <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/agriuma/article/view/4357>
- Malelak, C. (2019). Potensi Pengembangan Produk Unggulan Pertanian Lahan Kering Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Evolusi MIPA*, 1(1), 105–112.
- Mulyono, Munibah, J., & Khursatul. (2017). Strategi Pembangunan Pertanian Di Kabupaten Bantul Dengan Pendekatan a'Wot. *Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 19(3), 199. <https://doi.org/10.21082/jpntp.v19n3.2016.p199-211>
- Nalle, F. W. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Agrimor*, 3(3), 47–51. <https://doi.org/10.32938/ag.v3i3.452>
- Nisak, Z. (2013). Analisis Swot Untuk Menentukan Strategi Kompetitif.

- Academia*, 468–476.
- Ponto, S. O., Kumenaung, A., & Wauran, P. (2015). Analisis Korelasi Sektor Pertanian terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15(No. 04), 137–147.
- Posma, S., Kennedy, Johnson, Tobing, L, S. J., Toruan, L, R., Tampubolon, & Emma. (2019). Analisa Kondisi Ketahanan Energi Di Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dengan Negara Timor Leste. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 2(30), 104–110.
- Prawoto, N. (2010). Pengembangan Potensi Unggulan Sektor Pertanian. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 11(1), 1–19. <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1275>
- Purwansyah, E., Tan, F., Achmad, E., & Syamsurijal. (2013). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pengembangan Sektor Pertanian Di Kabupaten Muaro Jambi. *Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(1), 29–34.
- Sragen, D. I. K. (2012). Strategi Pengembangan Wilayah Melalui Analisis Sektor Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sragen. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.476>
- Supriyati. (2019). Dinamika Ekonomi Ketenagakerjaan Pertanian : Permasalahan Dan Kebijakan Strategis Pengembangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 8(1), 0–14.
- Suryanto, G. I. (2014). Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan di Era Pengetahuan Terbuka. In *Academia.Edu* (Issue 7). [http://www.academia.edu/download/35743325/Buku\\_Ekonomi\\_Inklusif\\_Rev\\_X4\\_Fix.pdf](http://www.academia.edu/download/35743325/Buku_Ekonomi_Inklusif_Rev_X4_Fix.pdf)
- Sutrisno, A. (2012). Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Pengembangan Sektor Unggulan Di Kabupaten Dalam Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2007-2010. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.15294/edaj.v1i1.465>
- Syahza, A., & Suarman, S. (2018). Model Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 18(3), 365–386. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i3.154>
- Syairozi, M. I. (2020). Analisis Kemiskinan di Sektor Pertanian ( Studi Kasus Komoditas Padi di Kabupaten Malang ). *Media Ekonomi*, 28(2), 114–128.
- Triasni, A. (2019). Analisis Dampak Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha Tani (Jitut) Terhadap Peningkatan Produksi & Produktivitas .... *Jurnal Ilmiah Agrotani*, 1(1), 16–22. <http://ojs.lppmuniprima.org/index.php/agrotani/article/view/21>
- Wahyuningsih, P. dan T. W. (2021). Pemetaan Potensi Daerah Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Menggunakan Metode Tipologi Klassen dan Location Quotient ( LQ ) (Studi Kasus di Kabupaten Rembang Tahun 2016-2020). 7(01), 77–95.